



Evaluasi Pemanfaatan Jampersal Di Kota Prabumulih Tahun 2020

Djoko Listyano^{*1}, Ignasius Hendrasmo², Mega Nugraha³

^{1,2,3}Universitas Tamansiswa Palembang

Alamat: Jl. Tamansiswa No. 261 (Lapangan Hatta) Ilir Timur I Kota Palembang

Korespondensi penulis: djokolisyano@unitaspalembang.ac.id

Abstract; *This study aims to describe the Evaluation of Jampersal Utilization in Prabumulih City in 2020. This research was conducted for three months using a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The data analysis technique was performed by presenting data, reducing data, and collecting data. The results show that the main focus of this program is to provide extra services and special guarantees for mothers and babies from pregnancy to after delivery, is to save human lives, avoid maternal and child mortality and help health in the sense of ensuring that they are in good and safe condition. The use of Jampersal is not of much interest to the community, this is because there is a mindset from the community that government programs do not provide quality services such as those outside government programs or in general both in hospitals and in midwives' practices or maternity hospitals. The Jampersal program is one of the breakthroughs and solutions from the government for the underprivileged, even though the service conditions are not as expected, it means that this program from the government without cost should not be of low quality and improper, because of course this is against social justice. The obstacle in implementing the Jampersal policy program lies in the school facilities and infrastructure that the Government still cannot fulfill through the Health Office in order to provide services for pregnant women. Supporting factors. The quality and the existence of professional and humanitarian oaths make medical personnel provide excellent and extra services to the community, especially to mothers who are about to give birth. Meanwhile, the inhibiting factor. Not all facilities owned by the Puskesmas in Prabumulih City meet the sufficient requirements and criteria to encourage the Jampersal program, so in the future there must be a lot of improvements.*

Keywords: *Evaluation, Policy Program, Jampersal*

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Pemanfaatan Jampersal di Kota Prabumulih Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara penyajian data, reduksi data, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus utama program ini adalah memberikan pelayanan ekstra dan jaminan khusus bagi ibu dan bayi sejak hamil sampai setelah melahirkan, adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia, menghindari kematian ibu dan anak serta membantu kesehatan dalam artian memastikan dalam kondisi baik dan aman. Pemanfaatan Jampersal kurang diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan adanya pola pikir dari masyarakat bahwa program pemerintah tidak memberikan pelayanan yang bermutu seperti yang diluar program pemerintah atau secara umum baik di rumah sakit maupun di tempat praktik bidan atau rumah bersalin. Program Jampersal merupakan salah satu terobosan dan solusi dari pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, meskipun kondisi pelayanannya belum sesuai dengan yang diharapkan, artinya program dari pemerintah tanpa biaya ini jangan sampai kualitasnya jelek dan tidak layak, karena tentu saja hal tersebut bertentangan dengan keadilan sosial. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan program Jampersal terletak pada sarana dan prasarana sekolah yang masih belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan bagi ibu hamil. Faktor pendukung. Kualitas dan adanya sumpah profesi dan kemanusiaan membuat tenaga medis memberikan pelayanan yang prima dan ekstra kepada masyarakat, khususnya kepada ibu yang akan melahirkan. Sedangkan faktor penghambat. Belum semua sarana yang dimiliki oleh Puskesmas di Kota Prabumulih memenuhi syarat dan kriteria yang cukup untuk mendorong terlaksananya program Jampersal, sehingga kedepannya harus banyak dilakukan pembenahan.

Kata kunci: *Evaluasi, Kebijakan Program, Jampersal*

PENDAHULUAN

Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan bayi neonatal. Salah satu tujuan program ini adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit pada ibu dan anak melalui peningkatan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan prenatal di tingkat pelayanan dasar dan pelayanan rujukan primer (Sistriani, 2014).

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang dapat menggambarkan kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2014). Japan International Cooperation Agency (JICA) menyusun Buku Kesehatan Ibu dan Anak pada tahun 1947, dan terbukti efektif menurunkan AKI dan AKB karena dapat mendeteksi kehamilan resiko tinggi sejak awal (Wijhati, 2017). Penyebab terjadinya AKI yaitu: terjadinya perdarahan, preeklamsi/eklamsi, infeksi, atau penyakit yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan yang dapat memperburuk kondisi kehamilan. penyebab lainnya yaitu berhubungan dengan status kesehatan reproduksi ibu, akses terhadap pelayanan kesehatan, perilaku penggunaan fasilitas kesehatan, dan juga faktor demografi dan sosiokultural (Iqbal, Shaheen, dan Begum, 2014).

Jampersal merupakan salah satu kebijakan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan untuk meningkatkan akses pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas dan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Jampersal diperuntukkan bagi ibu yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang dilaksanakan pada fasilitas yang bekerja sama dengan program (Kemenkes RI, 2012). Jampersal merupakan pengembangan dari Jamkesmas dengan jumlah perkiraan sasaran Jampersal adalah sebesar 60% dari estimasi jumlah persalinan. Jampersal dilaksanakan secara bertahap mulai 2011, dengan prioritas dalam perkiraan ibu bersalin dalam 1 tahun adalah 4,6 juta ibu hamil. Persalinan yang sudah dibiayai Jamkesmas mencapai 1,7 juta ibu hamil pertahun. Kementerian Kesehatan juga telah membuat petunjuk teknis pelaksanaan pada tahun 2011 yang kemudian direvisi pada tahun 2012, berdasarkan Permenkes RI No. 2562/MENKES/PER/ XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Dalam petunjuk tersebut sudah dijelaskan tentang prosedur atau petunjuk pelaksanaan Jampersal.

Tanggapan pemerintah kabupaten atau kota terhadap program Jampersal sangat bervariasi, ada daerah yang menerima dan ada yang tidak. Daerah yang tidak menerima umumnya adalah daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dengan alasannya karena persalinan gratis sudah dibiayai melalui Jamkesmas, Askes maupun Jamkesda yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Antara, 2011). Namun demikian, dengan adanya Jampersal sebenarnya dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Pelaksanaan Jampersal diharapkan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dibuat dan mekanisme pemanfaatan dana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di daerah. Di mana setiap daerah mempunyai aturan yang berbeda, sehingga implementasi kebijakan di setiap daerah akan bervariasi.

Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan (Kemenkes RI, 2011).

Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidaktersediaan biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melalui program yang dinamakan Jaminan Persalinan (jampersal). Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan Jaminan Persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. (Kemenkes, 2011).

Masih rendahnya cakupan pelayanan Jaminan Persalinan di Kota Prabumulih, mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan pelayanan Jaminan Persalinan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan neonatal, dan pelayanan KB masih rendah. Hal ini terkait dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan jaminan persalinan di sarana kesehatan setempat. Keadaan tersebut juga disebabkan adanya hambatan karakteristik predisposisi (pengetahuan dan kesadaran), hambatan karakteristik penguat (jarak, waktu pelayanan, informasi) dan hambatan karakteristik kebutuhan (pelayanan petugas, sarana prasarana).

Jampersal di Kota Prabumulih diatur dalam Perwali No. 9 Tahun 2017 Tentang Jampersal di Kota Prabumulih. Pada Pasal 1 Ayat 5 dan 6 berisi bahwa:

“Pada pasal 5 berbunyi Tim Pengelola Jampersal Kota Prabumulih adalah Tim Pengelola Program Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. Sedangkan pada pasal 6 berbunyi Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama”

Kondisi yang ada di lapangan dalam penerapan Jampersal saat ini berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari pelaksanaan program Jampersal menunjukkan ada beberapa tahapan yang berhasil terlaksana dengan baik, ada pula yang belum terlaksana dengan baik. Kekurangan secara finansial maupun kekurangan kordinator/ kerjasama antara pengelola program dan peserta/ sasaran program merupakan penyebab utama mengapa masih ada tahapan yang belum baik pelaksanaannya. Tentunya permasalahan ini harus dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab permasalahan tersebut terjadi sehingga bisa dilakukan perbaikan.

Ada beberapa indikasi yang menjadi persoalan perlunya ada evaluasi dalam

pemanfaatan Jampersal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan jaminan persalinan, hambatan karakteristik predisposisi (pengetahuan dan kesadaran), hambatan karakteristik penguat (jarak, waktu pelayanan, informasi), dan hambatan karakteristik kebutuhan (pelayanan petugas, sarana prasarana).

Dari pemaparan di atas mengenai permasalahan pemanfaatan Jampersal yang belum maksimal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Jampersal Di Kota Prabumulih Tahun 2020”.

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori evaluasi menurut Dunn (2003:608-609) dengan beberapa indikator yaitu terfokus pada nilai, fakta nilai terinterpretasi. Yang menjadi tuntutan dari evaluasi adalah soal fakta dan nilai, berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Dan dualitas nilai.

LANDASAN TEORI

Pengertian Evaluasi

Evaluasi bisa dimaknai dengan pemberian nilai, pemberian peringkat dan penaksiran, evaluasi sangat penting sebagai upaya dari perbaikan. Evaluasi kerja merupakan bentuk dari wujud dan tanggungjawab. Akuntabilitas tidak hanya bersikap transparan terhadap apa yang dilakukan akan tetapi lebih daripada ke bagaimana melakukan dengan baik dan optimal

Evaluasi adalah hasil dari penerapan kebijakan dimana hasil-hasil kebijakan tersebut akan memperlihatkan tercapai tidaknya tujuan, dan ini sangat penting, untuk perbaikan kedepannya. Evaluasi kerja merupakan bagian akhir dari proses kerja. Adanya evaluasi kerja akan membantu pemimpin dalam membuat keputusan dan kebijakan, karena dari evaluasi ada banyak hal yang bisa jadi bahan pertimbangan bagi para pemimpin dalam membuat kebijakan dan keputusan

Dalam pandangan Taliziduhu Ndraha menerangkan bahwa makna dari evaluasi merupakan perbandingan antara realita yang dihayati atau apa yang sudah ditentukan dan dengan fakta yang terjadi di lapangan (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya evaluasi ada sejauh mana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan kondisi fakta yang sebenarnya. Jika ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka disinilah pentingnya evaluasi.

Dalam pandangan Dunn (2003:608-609) mengemukakan jika evaluasi memiliki karakteristik yang membedakan yaitu sebagai berikut:

1. Terfokus pada nilai. Evaluasi mempunyai perbedaan dengan pemantauan terpusat pada penilaian dan yang menyangkut dengan penilaian-penilaian.
2. Fakta nilai terinterpretasi. Yang menjadi tuntutan dari evaluasi adalah soal fakta dan nilai
3. Berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Evaluasi lebih menuntun pada hasil masa lalu dan masa sekarang bukan berorientasi pada masa depan.
4. Dualitas nilai. Evaluasi memiliki dua nilai, yaitu evaluasi erat kaitannya dengan hasil dan teknik atau cara.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa evaluasi terdiri dari 4 karakter yaitu pertama terfokus pada nilai. Evaluasi mempunyai perbedaan dengan pemantauan terpusat pada penilaian dan yang menyangkut dengan penilaian-penilaian. Kedua fakta nilai terinterpretasi. Yang menjadi tuntutan dari evaluasi adalah soal fakta dan nilai. Ketiga

berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Evaluative lebih menuntut pada hasil masa lalu dan masa sekarang bukan beorientasi pada masa depan. Keempat dualitas nilai. Evaluasi memiliki dua nilai, yaitu evaluasi erat kaitannya dengan hasil dan teknik atau cara

Didasarkan pada uraian di atas, evaluasi terbagi beberapa kriteria: salah satu jalan atau mendapatkan atau mencapai tujuan yang sudah menjadi sasaran. Jadi merupakan. Efisiensi yaitu bermakna untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tingkat dari apa-apa yang menjadi suatu tujuan, berkaitan dengan jumlah usaha tertentu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga, kecukupan adalah sejauh mana usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Fungsi Evaluasi

Evaluasi mempunyai beberapa fungsi yaitu :

Pertama. Memberikan informasi untuk kinerja kebijakan, baik program maupun kegiatan, berkenaan seberapa jauh kebutuhannya yang diinginkan, adapun nilai serta kesempatan yang telah diberikan. Melalui evaluasi dapat dicapai target atau sasaran yang diinginkan.

Kedua. Bisa memberikan sumbangan klarifikasi dan kritik atau masukan. Evaluasi memberikan sumbangan pada target dan tujuan yang ingin dicapai. Memperjelas nilai untuk mencapai target yang diinginkan

Ketiga. Memberikan sumbangan terhadap metode analisis kebijakan yang diharapkan, dalam hal ini rumusan masalah dan kebijakannya. Adanya informasi yang berkenaan dengan tidak maksimalnya suatu program kebijakan, kegiatan atau program memberikan kontribusi terhadap penarikan kebijakan. Evaluasi bisa menyumbangkan rekomendasi, untuk pendefinisian kebijakan, yang memberikan manfaat untuk perbaikan kebijakan dan bisa memberlakukan kebijakan yang lain. (Tim Penyusun Modul Sistem AKIP;2007)

Berdasarkan pendapat di atas evaluasi bisa diterjemahkan dengan memberikan pendapat yang benar dan tidak benar kepada public. Memberikan masukan kritikan dan klarifikasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai kurang berjalan dengan maksimal, sehingga kedepannya bisa ada perbaikan kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pengertian Evaluasi Kinerja

Pengertian Evaluasi kinerja bisa dimaknai dengan "*Performance evaluation*" dan bisa juga dimaknai dengan "*Performance appraisal*". Secara umum bisa diartikan dengan pemberian penilaian atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan memberikan penilaian terhadap hasil kerja pegawai, penilaian berupa prestasi kerja atau reward dan lainnya. Dalam hal ini evaluasi kinerja adalah bentuk yang bisa dikatakan cukup adil dalam memberikan penilaian atau penghargaan kepada pegawai. Semua pegawai atau karyawan ingin mendapat pengakuan dan penghargaan dari orang lain, hal ini masuniawi maka dari itu tidak jarang para pekerja memberikan yang terbaik dari dirinya untuk bisa diakui . Leon C. Mengginson dalam Mangkunegara, (2005: 10) mengatakan jika evaluasi kinerja suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk menentukan apakah pegawai atau karyawannya melakukan tugas dan pekerjaannya dengan sangat baik atau tidak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika evaluasi kinerja adalah suatu proses yang dilakukan oleh atasan terhadap pegawainya dalam menilai, apakah pegawai atau

karyawannya melakukan pekerjaannya dengan baik. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, untuk melihat adakah peningkatan kinerja dari yang sebelumnya. Sehingga atasan bisa memberikan pembinaan, motivasi dan arahan agar pegawai bisa meningkatkan kinerjanya untuk menggapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan Simanjuntak (2005:103) evaluasi kinerja merupakan suatu cara yang bisa digunakan oleh seorang pemimpin untuk menilai kinerja perorangan atau kelompok, apakah pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dari awal atau tidak, karena pencapaian kinerja itu baik tidaknya diukur dari sisi kesesuaian harapan dengan kenyataan.” Dari kejelasan di atas bisa dimaknai bahwa evaluasi kinerja merupakan kemampuan atasan untuk melihat kinerja pegawainya yang di dasarkan pada tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya.

Di dasarkan pendapat ahli di atas bahwa evaluasi kinerja adalah bentuk pemberian penilaian yang otomatis untuk menentukan kualitas kerja pegawai bagus atau tidak. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Fungsi Evaluasi Kinerja

Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (2009) sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan masukan kepada aparatur kepada kinerjanya. Saat merekrut pegawai, pegawai harus melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan SOP dan standar kerja yang telah ditetapkan
- b. Alat promosi jabatan dan demosi jabatan. Semua sistem di Lembaga atau organisasi apapun menjadikan evaluasi kinerja sebagai alasan untuk memebrikan promosi jabatan bagi yang bekerja dengan bagus dan memiliki prestasi kerja, akan tetapi sebaliknya bagi yang kinerjanya menuru, amaka akan mendapatkan penurunan jabatan atau mutasi jabatan.
- c. Alat memotivasi pegawai. Dalam organisasi pegawai, memang hasil evaluasi bisa dijadikan tolok ukur pegawai sejauh mana kemmapuan kerjanya, jika sudah tahu atau sudah mengeytahuinya, maka akan dijadikan alat untuk memotivasi dirinya agar bisa meningkatkan kinerjanya.
- d. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Bentuk evaluasi merupakan sistem yang bisa digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai
- e. Konseling kinerja. Tidak semua pegawai memiliki hasil kinerja buruk karena kualitasnya buruk, bisa jadi karena disebabkan oleh masalah pribadi, hal inilah yang dibutuhkan yaitu tempat untu konseling atau penyelesaian masalah pribadi, karen dalam kinerja ada banyak faktor yang memberikan pengaruh termasuk masalah pribadi dan lingkungan.
- f. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi bisa digunakan untuk aparatur pemerintah dalam menaikkan karis dan jenjang jabatannya. Evaluasi jelas akan erat kaitannya dengan peningkatan karir pegawai, apakah kinerjanya sesuai dengan apa yang diharapkan (Wirawan, 2009:24)

Dari pendapat di atas dapat di uraikan bahwa penilaian kinerja atau evaluasi

kinerja merupakan cara yang bisa digunakan dalam perbaikan organisasi dan lembaga melalui, memberikan evaluasi terhadap kinerja pegawai yang ada apakah memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi sasaran tujuan awal. Kemudian sisi-sisi yang dianggap lemah akan diperbaiki dan sisi-sisi yang kuat akan dipertahankan, sehingga kedepannya akan menghasilkan yang produk yang lebih baik, artinya tetap ada perbaikan kinerja, jika kinerja terus diperbaiki, maka akan menghasilkan kemajuan bagi lembaga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

Nazir (2011: 52) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2015: 5) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun penelitian ini akan membahas tentang Evaluasi Pemanfaatan Jampersal Di Kota Prabumulih Tahun 2020.

HASIL PENELITIAN

Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir (BBL) (Permenkes, 2011). Jaminan persalinan merupakan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan untuk pembayaran pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir (Pudiastuti, 2011).

Evaluasi Pemanfaatan Jampersal Di Kota Prabumulih Tahun 2020

Evaluasi adalah hasil dari penerapan kebijakan dimana hasil-hasil kebijakan tersebut akan memperlihatkan tercapai tidaknya tujuan, dan ini sangat penting, untuk

perbaikan kedepannya. Evaluasi kerja merupakan bagian akhir dari proses kerja. Adanya evaluasi kerja akan membantu pemimpin dalam membuat keputusan dan kebijakan, karena dari evaluasi ada banyak hal yang bisa jadi bahan pertimbangan bagi para pemimpin dalam membuat kebijakan dan keputusan

Evaluasi terdiri dari 4 karakter yaitu pertama terfokus pada nilai. Evaluasi mempunyai perbedaan dengan pemantauan terpusat pada penilaian dan yang menyangkut dengan penilaian-penilaian. Kedua fakta nilai terinterpretasi. Yang menjadi tuntutan dari evaluasi adalah soal fakta dan nilai. Ketiga berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Evaluasi lebih menuntut pada hasil masa lalu dan masa sekarang bukan berorientasi pada masa depan. Keempat dualitas nilai. Evaluasi memiliki dua nilai, yaitu evaluasi erat kaitannya dengan hasil dan teknik atau cara

Terfokus Pada Nilai

Terfokus pada nilai. Evaluasi mempunyai perbedaan dengan pemantauan terpusat pada penilaian dan yang menyangkut dengan penilaian-penilaian. Pada dasarnya terfokus pada nilai lebih melihat pada sisi tujuan dari program Jampersal itu sendiri.

Memfokuskan evaluasi yaitu memfokuskan apa dan bagaimana evaluasi akan dilakukan. Seperti memfokuskan kamera, fokus evaluasi berarti melihat beberapa variabel dengan teliti. Biasanya variabel ini termasuk objek yang akan dievaluasi, tujuan evaluasi, individu yang akan terlibat, latar belakang dan pengaruhnya pada evaluasi, serta pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab oleh evaluasi untuk mencapai tujuan evaluasi. Bila evaluasi sudah terfokus, maka ini berarti proses dan desain dimulai. Ketentuan-ketentuan pada tahap ini harus diperhatikan dengan teratur untuk diubah apabila sewaktu-waktu ada perubahan pada objek, wadah, dan individu yang terlibat. Anda harus memperhatikan ketentuan tersebut dalam evaluasi apapun, apakah ini untuk memenuhi permintaan biaya diluar untuk menggabungkan program atau untuk tujuan-tujuan yang lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus utama dari program ini yaitu memberikan layanan ekstra dan jaminan khusus bagi ibu dan bayi mulai dari hamil hingga sesudah melahirkan tujuannya adalah menyelamatkan nyawa manusia yaitu menghindari angka kematian ibu dan anak serta menjaga Kesehatan keduanya dalam arti memastikan dalam kondisi yang baik dan selamat.

Fakta Nilai Terinterpretasi

Fakta nilai terinterpretasi. Yang menjadi tuntutan dari evaluasi adalah soal fakta dan nilai. Ada beberapa indikasi yang menjadi persoalan perlunya ada evaluasi dalam pemanfaatan Jampersal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan jaminan persalinan, hambatan karakteristik predisposisi (pengetahuan dan kesadaran), hambatan karakteristik penguat (jarak, waktu pelayanan, informasi), dan hambatan karakteristik kebutuhan (pelayanan petugas, sarana prasarana).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan Jampersal memang tidak terlalu banyak diminati masyarakat, hal ini karena ada mindset dari masyarakat bahwa program pemerintah tidak memberikan pelayanan yang berkualitas seperti yang di dapat di luar program pemerintah atau yang umum baik di rumah sakit maupun di bidan praktek atau rumah bersalin. Artinya dalam hal ini pemerintah perlu melakukan evaluasi secara mendalam mengenai program Jampersal ini harus diperhatikan secara maksimal

mengenai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari fasilitas hingga obat-obatan.

Berorientasi pada masa lalu dan sekarang.

Berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Evaluative lebih menuntut pada hasil masa lalu dan masa sekarang bukan berorientasi pada masa depan. Latar Belakang: Program Jampersal diluncurkan di Indonesia mulai Januari tahun 2011 berdasarkan Permenkes No.631/Menkes/PER/III/2011 bertujuan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana oleh tenaga kesehatan secara cuma-cuma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan atau program ini sebagai salah satu terobosan dan solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu, meskipun dengan kondisi pelayanan yang belum sesuai harapan, artinya jangan sampai program dari pemerintah yang tanpa biaya ini menjadi tidak berkualitas dan seadanya saja, karena tentu hal ini bertentangan dengan keadilan sosial.

Dualitas nilai

Dualitas nilai. Evaluasi memiliki dua nilai, yaitu evaluasi erat kaitannya dengan hasil dan teknik atau cara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan program kebijakan Jampersal ada pada kendala sarana dan prasarana yang masih belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan bagi ibu hamil.

Faktor Pendukung Dan Penghambat

Faktor Pendukung

Tenaga kesehatan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan No 36 tahun 2014 merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan juga memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga mampu mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Tenaga kesehatan memiliki beberapa petugas yang dalam kerjanya saling berkaitan yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan ketenagaan medis lainnya (Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996).

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya sumpah profesi dan kemanusiaan menjadikan tenaga medis memberikan pelayanan prima dan ekstra kepada masyarakat khususnya kepada ibu-ibu yang akan melakukan persalinan.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dari program Jampersal ini secara umum di berbagai kota tanpa terkecuali kota Prabumulih yaitu ada pada persoalan sarana dan prasarana pendukung program kebijakan. Dari hasil penelitian menegaskan bahwa tidak semua fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas yang ada di Kota Prabumulih memenuhi syarat dan kriteria yang cukup dalam mendorong program Jampersal, maka kedepannya harus ada banyak perbaikan.

KESIMPULAN

Evaluasi Pemanfaatan Jampersal Di Kota Prabumulih Tahun 2020

Terfokus Pada Nilai. Fokus utama dari program ini yaitu memberikan layanan ekstra dan jaminan khusus bagi ibu dan bayi mulai dari hamil hingga sesudah melahirkan tujuannya adalah menyelamatkan nyawa manusia yaitu menghindari angka kematian ibu dan anak serta menjaga Kesehatan keduanya dalam arti memastikan dalam kondisi yang baik dan selamat.

Fakta Nilai Terinterpretasi. Penggunaan Jampersal memang tidak terlalu banyak diminati masyarakat, hal ini karena ada mindset dari masyarakat bahwa program pemerintah tidak memberikan pelayanan yang berkualitas seperti yang di dapat di luar program pemerintah atau yang umum baik di rumah sakit maupun di bidan praktek atau rumah bersalin.

Berorientasi pada masa lalu dan sekarang. Program Jampersal sebagai salah satu terobosan dan solusi dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu, meskipun dengan kondisi pelayanan yang belum sesuai harapan, artinya jangan sampai program dari pemerintah yang tanpa biaya ini menjadi tidak berkualitas dan seadanya saja, karena tentu hal ini bertentangan dengan keadilan social.

Dualitas nilai. Kendala dalam penerapan program kebijakan Jampersal ada pada kendala sarana dan prasarana yang masih belum bisa dipenuhi oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan dalam rangka memberika pelayanan bagi ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara 2006. *Evaluasi Kinerja SDM*. Jakarta: Eresco
- Arikunto, S 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Commonwealth of Australia Department of Finance, 1989
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dharma, Surya. 2009. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan. Penerapannya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N., 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada. University Press, Yogyakarta
- Fernandes, H.J.X. 1984. *Testing and measurement*. Jakarta: National Education, Planning, Evaluation and Curriculum Development.
- H.B. Sutopo. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- Isaac, S., & Michael, W.B. 1984. *Handbook in research and evaluation*. California: Edits Publishers.

- John M. *Ivancevich*, 1992. *Human Resources Management*. Foundations of Personnel
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjuntak*, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Soekidjo *Notoatmodjo*, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT Rineka. Cipta, Jakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta